

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya pertumbuhan populasi penduduk di China pada era pemerintahan sebelumnya, mengakibatkan timbulnya permasalahan ekonomi dan sosial di China pada era pemerintahan Deng Xiaoping. Karena permasalahan inilah kemudian pada tahun 1979 Deng Xiaoping membuat dan memberlakukan kebijakan *One Child Policy* di China, sebagai bentuk upaya untuk mengatasi lonjakan penduduk. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan batasan kepemilikan jumlah anak terhadap pasangan suami istri di China.¹ Setelah diberlakukan, kebijakan *One Child Policy* berhasil menurunkan jumlah penduduk hingga 400 juta jiwa pada tahun 1980.² Meskipun kebijakan *One Child Policy* berhasil membawa perekonomian China meroket, akan tetapi kebijakan ini memberikan dampak yang buruk bagi kaum wanita di China. Adapun dampak buruk nya ialah, banyaknya praktik aborsi di China.³

Setelah berjalan selama dua dekade, kebijakan *One Child Policy* mulai menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Kebijakan ini menimbulkan “Aging

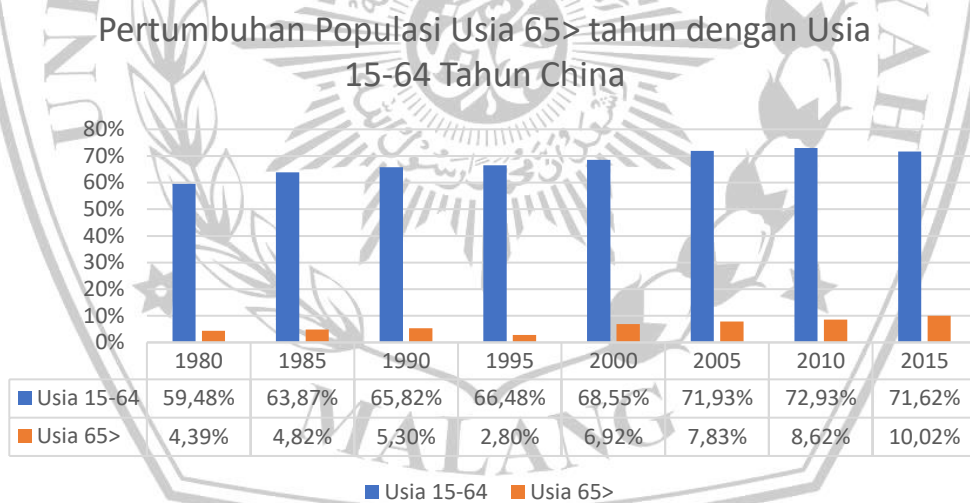
¹ Nayyiroh, “Kebijakan *One Child Policy* Di China _ PDF,” n.d., <https://id.scribd.com/doc/296690043/Kebijakan-One-Child-Policy-Di-China>.

² Andrew Mullen, “China’s 1-Child Policy: What Was It and What Impact Did It Have?,” June 1, 2021, <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3135510/chinas-one-child-policy-what-was-it-and-what-impact-did-it>.

³ Wabilia Husnah, “Efek Kebijakan Satu Anak Terhadap Kehidupan Perempuan Di Tiongkok: Sebuah Ironi,” *Jurnal Kajian Wilayah* 7, no. 2 (2016): 145, <https://doi.org/10.14203/jkw.v7i2.749>.

Population” yaitu tingginya angka populasi lanjut usia (usia 65 tahun keatas) dan rendahnya atau tidak bertambahnya angka populasi usia produktif (usia 15-64 tahun).⁴ Berdasarkan data dari *World Bank* yang dikutip pada tahun 2022, pertumbuhan populasi lanjut usia (usia 65 tahun keatas) pada tahun 1980 ke tahun 2015 dalam rentang waktu per 5 tahun, terus mengalami peningkatan sebesar 72%.⁵ Sedangkan pertumbuhan populasi usia produktif (usia 15-64 tahun) pada tahun 1980 ke tahun 2015 dalam rentang waktu per 5 tahun, hanya bertumbuh sebanyak 16%.⁶

Gambar 1. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Populasi Usia 65 tahun dengan Usia 15-64 Tahun di China (1980-2015)



Sumber: Data diolah oleh penulis dari *World Bank*

⁴ Nafilah Sri Sagita K, “Resesi Seks Dan Pertumbuhan Ekonomi China,” *Detikhealth*, September 12, 2022, <https://news.detik.com/kolom/d-6288772/resesi-seks-dan-pertumbuhan-ekonomi-china/amp>.

⁵ The World Bank, “Population Ages 65 and above, Total,” *World Bank Data*, 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?contextual=population-by-age&end=2022&locations=CN&start=1960&view=chart>.

⁶ The World Bank, “Population Ages 15-64 (% of Total),” *World Development Indicators*, 2022, <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS/countries>.

Akhirnya, pemerintah China yaitu Xi Jinping memutuskan untuk mengakhiri kebijakan *One Child Policy* dan memberlakukan kebijakan baru per 1 Januari 2016. Adapun kebijakan baru tersebut ialah kebijakan *Two Child Policy*.⁷ Kebijakan *One Child Policy* dirubah karena memiliki dampak negatif yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial di China.⁸

Kebijakan *Two Child Policy* merupakan kebijakan baru yang diterapkan di China dengan tujuan untuk mengatasi penurunan populasi dan penurunan angka kelahiran di China yang disebabkan oleh resesi seks. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan populasi di China terus mengalami penurunan hingga tahun 2021.⁹ Berdasarkan data yang dikutip dari *Macrotrends*,¹⁰ penurunan tingkat pertumbuhan populasi di China dari tahun 2016 ke tahun 2021 sebesar 0.52%. China yang kini mengalami resesi seks akibat dari kebijakan *One Child Policy*, beralih melonggarkan kebijakannya agar tiap-tiap pasangan di China dapat memiliki dua orang anak.

Resesi seks sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi penurunan aktivitas berhubungan seksual di Amerika Serikat.¹¹ Yang kini banyak dialami negara-negara lain dan salah satunya China. Resesi seks merupakan istilah yang merujuk kepada penurunan gairah pasangan untuk berhubungan

⁷ Wang Feng, Baochang Gu, and Yong Cai, "The End of China's One-Child Policy," *Studies in Family Planning* 47, no. 1 (March 1, 2016): 83–86, <https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2016.00052.x>.

⁸ John Bongaarts and Susan Greenhalgh, "An Alternative to the One-Child Policy in China," *Source: Population and Development Review*, vol. 11, 1985.

⁹ *Ibid*

¹⁰ MacroTrends, "China Population 1950-2023 | MacroTrends," 2022, <https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/population-growth-rate>.

¹¹ Caroline Kitchener, "What's Causing the Sex Recession?," *The Atlantic*, 2018, <https://www.theatlantic.com/membership/archive/2018/11/whats-causing-the-sex-recession/575890/>.

seksual, menikah, dan memiliki anak.¹² Fenomena ini tidak hanya dialami China, tetapi juga di beberapa negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan, hal ini menjadi masalah demografi serius yang dapat berdampak dalam berbagai aspek kehidupan seperti salah satunya yaitu perekonomian negara.¹³ Resesi seks kian meningkat tajam akibat tekanan ekonomi, bagi pasangan China memiliki anak akan menambah pengeluaran biaya hidup, biaya hidup di China yang relatif mahal menjadi penyebab utama para pasangan di China enggan memiliki anak.

Kebijakan *Two Child Policy* ini tidak bertahan lama dikarenakan tidak memberi hasil yang signifikan pada pertumbuhan populasi penduduk China. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikutip melalui *Statista*, kebijakan *Two Child Policy* hanya meningkatkan pertumbuhan populasi penduduk pada tahun 2016 sebesar 0.16%, kemudian di tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi penurunan kembali.¹⁴ Melihat upaya dari kebijakan *Two Child Policy* tidak memberikan hasil yang baik, pemerintah China yaitu Xi Jinping akhirnya merubah kebijakan tersebut pada tahun 2021. Adapun kebijakan baru tersebut yaitu kebijakan *Three Child Policy*.¹⁵

Kebijakan *Three Child Policy* resmi diterapkan di China sebagai bentuk pembebasan kepada pasangan-pasangan China untuk memiliki anak lebih dari dua, kebijakan ini diharapkan dapat menaikkan pertumbuhan populasi di China dan

¹² Suci Risanti Rahmadania, "Apa Itu 'Resesi Seks', Biang Kerok Kelahiran China Merosot Tajam," *Detikhealth*, n.d., <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6240425/apa-itu-resesi-seks-biang-kerok-kelahiran-china-merosot-tajam>.

¹³ Nafilah Sri Sagita K, "'Resesi Seks' Di China Nyata, Bakal Seperti Ini Efeknya," *Detikhealth*, 2022, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6240405/resesi-seks-di-china-nyata-bakal-seperti-ini-efeknya>.

¹⁴ C. Textor, "China Population Growth 2022 - Statista" (2023), <https://www.statista.com/statistics/270129/population-growth-in-china/>.

¹⁵ BBC, "China Allows Three Children in Major Policy Shift - BBC News," *Bbc.Com*, 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57303592>.

mengatasi resesi seks di China. Selain membuat kebijakan baru, Pemerintah China juga membuat tindakan pendukung (*support measure*) yang menyediakan fasilitas-fasilitas baru dan menarik bagi pasangan yang mau memiliki anak.¹⁶ Serta mengupayakan kemudahan akses bagi Wanita China untuk mencapai tingkat kesuburannya. Kebijakan *Three Child Policy* merupakan upaya kedua pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi tren demografi dan resesi seks di negaranya.

Berdasarkan data dari Biro Statistik Nasional Tiongkok yang dikutip oleh Statista pada Januari 2023. Populasi Tiongkok menurun 850.000 orang menjadi sekitar 1.411,75 juta pada tahun 2022, ini adalah penurunan tingkat populasi pertama di Tiongkok sejak tahun 1961. Selain itu juga jika dilihat dari data tersebut, pertumbuhan populasi China pada tahun 2022 adalah pertumbuhan populasi terendah dari tahun 2000, pertumbuhan populasi ini bahkan berkurang 0.06% dari 0.03% pada tahun 2021.¹⁷ Tingkat Populasi penduduk China terus mengalami penurunan meskipun kebijakan *Three Child Policy* telah diberlakukan.

Tingkat populasi China yang terus mengalami penurunan akan berdampak pada sistem perekonomian China, selain penurunan populasi, resesi seks di China juga akan memberikan dampak buruk terhadap perekonomian China. Dampak buruk yang diberikan oleh resesi seks yaitu terjadinya "*Lonely Economy*" atau ekonomi kesepian. *Lonely economy* atau ekonomi kesepian adalah aksi ekonomi

¹⁶ Isa, "Mengapa 'Resesi Seks' Bisa Terjadi Di China?," 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220822103256-113-837413/mengapa-resesi-seks-bisa-terjadi-di-china/1>.

¹⁷ "China: Total Population 1980-2027 | Statista," 2023, <https://www.statista.com/statistics/263765/total-population-of-china/>.

yang disebabkan oleh masyarakat yang lebih memilih untuk hidup sendiri.¹⁸ Selain *Lonely Economy*, resesi seks juga menyebabkan “*Aging Population*”. Terjadinya *Lonely Economy* dan *Aging Population* ini akan berdampak besar pada pembangunan ekonomi China. Adapun dampak nyata yang terjadi saat ini yaitu terjadinya krisis properti di China, hal ini disebabkan oleh lambannya pertumbuhan penduduk sehingga permintaan rumah juga tidak meningkat akan tetapi pembangunan rumah terus berjalan.¹⁹

Pesatnya pertumbuhan perekonomian China menjadikan China sebagai negara dengan perekonomian terbesar urutan kedua di dunia.²⁰ Yang dimana dalam hal ini banyak perindustrian di berbagai belahan dunia bertumpu pada China.²¹ Maka dari itu dampak apa saja yang diberikan oleh resesi seks China dapat memberikan efek buruk bagi dunia. Dilansir dari BBC News, Shuang Chen asisten profesor di departemen kebijakan sosial di *London School of Economics* berpendapat bahwa penurunan populasi yang disebabkan oleh resesi seks di China berpotensi dapat memberikan dampak positif bagi perubahan iklim global,

¹⁸ Tommy Patrio Sorongan, “Xi Jinping Pening Resesi Seks, Apa Dampaknya Untuk Ekonomi_,” *CNBC Indonesia*, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220819085525-4-364941/xi-jinping-pening-resesi-seks-apa-dampaknya-untuk-ekonomi/amp>.

¹⁹ BBC News Indonesia, “Awal Mula Krisis Properti China Dan Dampaknya - Kompas,” *Kompas.Com*, August 11, 2022, <https://www.kompas.com/global/read/2022/08/11/200200170/awal-mula-krisis-properti-china-dan-dampaknya?page=all#page2>.

²⁰ Vika Azkiya Dihni, “10 Negara Dengan Ekonomi Terbesar Di Dunia Pada 2021,” 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/05/10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-dunia-pada-2021>.

²¹ BBC News Indonesia, “Bayi Lahir Di China Jumlahnya Menurun, Mengapa Demikian Dan Apa Dampaknya Bagi China Dan Dunia? - BBC News Indonesia,” 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57084983>.

mengingat China menjadi penyumbang emisi gas karbon terbesar sepanjang tahun 2022.²²

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena pada awalnya kebijakan China yang membatasi populasi angka kelahiran demi mencapai perekonomian yang lebih baik, kini bahkan menimbulkan resesi seks di China karena keengganan rakyatnya untuk memiliki anak, yang dimana timbulnya resesi seks di China dapat menurunkan kestabilan perekonomian China yang sedang meroket. Kebijakan kepemilikan anak terus diratifikasi oleh pemerintah China yaitu Xi Jinping, agar dapat menjaga kestabilan negaranya.

Maka dari itu, penulis ingin meneliti dan menganalisis upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi penurunan populasi dan resesi seks di China melalui kebijakan publik pemerintahan China yaitu, kebijakan *Three Child Policy*.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penjelasan dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Upaya Pemerintahan China Era Xi Jinping Dalam Menghadapi Resesi Seks Di China?.

²² Zaria Gorvett, "Apa Arti Penurunan Populasi Penduduk China Bagi Dunia?," *Bbc.Com*, January 24, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0x292qj84o>.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk:

1. Menjelaskan Upaya Pemerintahan China Era Xi Jinping dalam menghadapi resesi seks di China melalui kebijakan *Three Child Policy*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Akademis

Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru kepada masyarakat luas terutama bagi para pelajar studi hubungan internasional, serta dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Manfaatnya secara praktis yaitu penulis berharap penelitian ini mampu membagikan informasi dan pemahaman mengenai apa saja upaya dan Tindakan pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi resesi seks di China serta dengan adanya penelitian ini juga menjadi tambahan baru dalam wawasan penulis.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama pada tahun **2022** berjudul **POPULASI, ONE CHILD POLICY DAN REFORMASI CINA** oleh **Yusnarida Eka Nizmi**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan *One Child Policy* di China dapat

memberikan dampak yang buruk bagi kaum perempuan, kebijakan ini berhasil menaikkan dan menstabilkan perekonomian China. Kebijakan satu anak yang ditetapkan bagi pasangan di China merupakan kebijakan ekonomi dan sosial, visi utama dari kebijakan ini ialah mencegah dan menurunkan angka populasi pertumbuhan penduduk di China, dengan demikian China dapat menrestorasi perekonomiannya agar meraih skala yang lebih tinggi. Menurut penulis, kebijakan satu anak ini banyak menimbulkan hal negatif, dan kebijakan ini harus segera direvisi.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, penelitian penulis lebih berfokus pada upaya pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi resesi seks China yang diakibatkan oleh kebijakan *One Child Policy*, sedangkan penelitian ini fokus untuk menganalisis kedudukan kebijakan *One Child Policy* dan penerapannya yang mengundang banyak pertentangan serta turunnya rasio tenaga kerja akibat pensiun “*Aging Population*”.

Penelitian terdahulu kedua pada tahun **2015** berjudul ***GENDER RATIO UNDER CHINA’S TWO-CHILD POLICY*** oleh **Bing Xu** dan **Maxwell Pak**. Penelitian ini membahas tentang ketidakseimbangan gender di China, meskipun kebijakan satu anak telah diubah menjadi kebijakan dua anak, ketidakseimbangan gender di China masih belum bisa teratasi. Hal ini dikarenakan pada awalnya kebijakan satu anak China menerapkan lebih baik memiliki anak laki-laki daripada perempuan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana para orang tua

²³ YUSNARIDA EKA NIZMI NIZMI, “Populasi, *One Child Policy* Dan Reformasi Cina,” *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 1 (2019): 80–101, <https://doi.org/10.32787/ijir.v3i1.86>.

menentukan keputusannya dalam pemilihan jenis kelamin anak setelah berlakunya kebijakan dua anak di China agar memiliki dua anak dengan jenis kelamin campuran, di mana orang tua dapat memilih antara membiarkan alam menentukan jenis kelamin anak mereka ataupun memanipulasi proses kelahiran untuk meningkatkan potensi mendapatkan anak.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana pada upaya pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi resesi seks China yang diakibatkan oleh kebijakan *One Child Policy*, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap ketidakseimbangan gender di China dibawah kebijakan *Two Child Policy*.

Penelitian terdahulu ketiga pada tahun **2015** berjudul ***ONE-CHILD POLICY AND FAMILY FIRMS IN CHINA*** oleh **Jerry Cao, Douglas Cumming** dan **Xiaoming Wang**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan satu anak di China dapat mempengaruhi perusahaan keluarga atau bisnis keluarga di China. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, kepemilikan satu anak dalam keluarga sangat mempengaruhi perusahaan dan bisnis keluarga. Hal ini dikarenakan jika hanya memiliki satu anak, maka hanya satu manajemen perusahaan yang dapat dikendalikan. Bagi para pebisnis, penting memiliki anak lebih dari satu agar kesuksesan perusahaan mereka dapat di manajemen dengan baik. Memiliki satu

²⁴ Bing Xu and Maxwell Pak, "Gender Ratio under China's Two-Child Policy," *Journal of Economic Behavior and Organization* 119 (November 15, 2015): 289–307, <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.08.008>.

anak dapat menyebabkan perusahaan berinvestasi lebih sedikit untuk pertumbuhan di masa depan.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, penelitian penulis lebih berfokus pada upaya pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi resesi seks China yang diakibatkan oleh kebijakan *One Child Policy*, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap bagaimana kebijakan *One Child Policy* berdampak pada perusahaan keluarga di China.

Penelitian terdahulu keempat pada tahun 2022 berjudul ***THE IMPACT OF TWO-CHILD POLICY ON EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT IN CHINA*** oleh Xiumin Hong, Yong Jiang, Li Luo dan Philip Hui Li. Penelitian ini menjelaskan bagaimana negara ini secara resmi memperkenalkan kebijakan satu anak yang ikonik di tingkat nasional pada tahun 1979, di mana sebagian besar pasangan China diizinkan untuk memiliki hanya satu anak selama lebih dari 30 tahun. Keluarga satu anak telah menjadi jenis keluarga yang dominan di China. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah China mencabut kebijakan satu anak pada November 2013 dan mengizinkan pasangan untuk memiliki anak kedua jika salah satu dari mereka adalah anak tunggal. Diperkirakan bahwa kebijakan universal dua anak di China telah berkontribusi pada 5,4 juta kelahiran tambahan untuk keluarga yang telah memiliki satu anak antara Juli 2016 dan Desember 2017. Dalam beberapa tahun terakhir, kelahiran anak kedua mencapai sekitar setengah dari semua bayi yang baru lahir, naik dari sekitar sepertiga pada tahun 2013.

²⁵ Jerry Cao, Douglas Cumming, and Xiaoming Wang, "One-Child Policy and Family Firms in China," *Journal of Corporate Finance* 33 (2015): 317–29, <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.01.005>.

Peningkatan kelahiran anak kedua telah menimbulkan tekanan baru pada sistem PAUD dan semakin memperbesar masalah "3A". Akibatnya, permintaan penyediaan PAUD di China semakin meningkat dan permintaan biaya PAUD agar menjadi lebih terjangkau juga ikut meningkat.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, penelitian penulis lebih berfokus pada upaya pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi resesi seks China yang diakibatkan oleh kebijakan *One Child Policy*, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap bagaimana dampak kebijakan *Two Child Policy* terhadap pendidikan dan perkembangan anak usia dini di China.

Penelitian terdahulu kelima berjudul **ANALISIS KEPENDUDUKAN: KEBIJAKAN ONE CHILD POLICY DI CHINA** oleh **Nayyiroh**. Penelitian ini menjelaskan bagaimana awal mula hingga dampak apa saja yang diberikan oleh kebijakan *One Child Policy*. Pada tahun 1979, pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping menciptakan kebijakan satu anak untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi akibat ledakan penduduk yang terjadi sebelum masa kepemimpinannya. Kebijakan ini menargetkan etnis Han, kelompok etnis mayoritas di China. Pelonggaran kebijakan ini juga menyasar pasangan yang tinggal di pinggiran China dan etnis minoritas yang populasinya kecil di China. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh baby boom yang dimulai pada tahun 1950-an yang meraih 500 juta orang penduduk, setelah lebih dari tiga dekade praktik tersebut dilaksanakan, kemudian pemerintah China mengeluarkan mandat yang secara resmi mengakhiri praktik

²⁶ Li Luo dan Philip Hui Li Xiumin Hong, Yong Jiang, "The Impact of Two-Child Policy on Early Education and Development in China," *Tandfonline* 33 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10409289.2022.2031439> © 2022 Taylor & Francis Group, LLC.

tersebut pada 29 Oktober 2015. Pemerintah China, yang mengklaim telah berhasil mencegah 400 juta kelahiran, akhirnya mengakhiri kebijakan tersebut karena alasan demografis: terlalu banyak warga negara China yang mencapai usia pensiun dan sangat sedikit orang China yang mencapai usia kerja (usia 15-64 tahun). Setidaknya 30% populasi China berusia di atas 50 tahun, dan populasi pekerja China telah menurun selama tiga tahun terakhir.²⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, penelitian penulis lebih berfokus pada upaya pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi resesi seks China yang diakibatkan oleh kebijakan *One Child Policy*, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap bagaimana awal mula hingga dampak apa saja yang diberikan oleh kebijakan *One Child Policy*.

NO	JUDUL PENELITIAN	METODOLOGI PENELITIAN	HASIL
1.	POPULASI, <i>ONE CHILD POLICY</i> DAN REFORMASI CINA oleh Yusnarida Eka Nizmi. 2022	Metodologi penelitian yaitu, kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan <i>One Child Policy</i> di China dapat memberikan dampak yang buruk bagi kaum perempuan, kebijakan ini berhasil menaikkan dan menstabilkan perekonomian China. Kebijakan satu anak yang ditetapkan bagi pasangan di China merupakan kebijakan

²⁷ *Op. Cit.*

			ekonomi dan sosial, visi utama dari kebijakan ini ialah mencegah dan menurunkan angka populasi pertumbuhan penduduk di China, dengan demikian China dapat menrestorasi perekonomiannya agar meraih skala yang lebih tinggi.
2.	<i>GENDER RATIO UNDER CHINA'S TWO-CHILD POLICY</i> oleh Bing Xu dan Maxwell Pak. 2015	Metodologi pada penelitian ini menggunakan Teknik <i>Decision Making</i> .	Penelitian ini membahas tentang ketidakseimbangan gender di China, meskipun kebijakan satu anak telah diubah menjadi kebijakan dua anak, ketidakseimbangan gender di China masih belum bisa teratasi. Hal ini dikarenakan pada awalnya yang satu anak China menerapkan lebih baik memiliki anak laki-laki daripada perempuan.
3.	<i>ONE-CHILD POLICY AND FAMILY FIRMS IN CHINA</i> oleh Jerry Cao, Douglas Cumming dan Xiaoming Wang. 2015	Metodologi penelitian yaitu studi empiris.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan satu anak di China dapat mempengaruhi perusahaan keluarga atau bisnis keluarga di China. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, kepemilikan satu anak dalam keluarga sangat mempengaruhi

			perusahaan dan bisnis keluarga.
4.	<i>THE IMPACT OF TWO-CHILD POLICY ON EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT IN CHINA</i> oleh Xiumin Hong, Yong Jiang, Li Luo dan Philip Hui Li. 2022	Menggunakan pendekatan metodologi penelitian campuran yang melibatkan jumlah sampel yang besar.	Keluarga satu anak telah menjadi jenis keluarga yang dominan di China. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah China mencabut kebijakan satu anak pada November 2013 dan mengizinkan pasangan untuk memiliki anak kedua jika salah satu dari mereka adalah anak tunggal. Diperkirakan bahwa kebijakan universal dua anak di China telah berkontribusi pada 5,4 juta kelahiran tambahan untuk keluarga yang telah memiliki satu anak antara Juli 2016 dan Desember 2017. Dalam beberapa tahun terakhir, kelahiran anak kedua mencapai sekitar setengah dari semua bayi yang baru lahir, naik dari sekitar sepertiga pada tahun 2013. Akibatnya, permintaan penyediaan PAUD di China semakin meningkat dan permintaan biaya PAUD agar menjadi lebih terjangkau juga ikut meningkat.
5.	ANALISIS KEPENDUDUKAN: KEBIJAKAN	Metodologi penelitian yaitu,	Pada tahun 1979, pemimpin Tiongkok

<p>ONE CHILD POLICY DI CHINA oleh Nayyiroh.</p>	<p>kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Deng Xiaoping menciptakan kebijakan satu anak untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi akibat ledakan penduduk yang terjadi sebelum masa kepemimpinannya. Kebijakan ini menargetkan etnis Han, kelompok etnis mayoritas di China. Pelonggaran kebijakan ini juga menyasar pasangan yang tinggal di pinggiran China dan etnis minoritas yang populasinya kecil di China. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh baby boom yang dimulai pada tahun 1950-an yang meraih 500 juta orang penduduk, setelah lebih dari tiga dekade praktik tersebut dilaksanakan, kemudian pemerintah China mengeluarkan mandat yang secara resmi mengakhiri praktik tersebut pada 29 Oktober 2015.</p>
---	---	--

1.6 Konsep

1.6.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah bentuk respon pemerintah terhadap masalah publik, masalah publik adalah masalah yang dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk menyelesaikannya.²⁸ Konsep kebijakan publik menurut Thomas R Dye adalah suatu pilihan yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, yang mana dapat dipahami bahwasannya menurut Thomas kebijakan publik adalah kebijakan yang dipilih oleh pemerintah dan pemerintah memiliki pilihan untuk melaksanakannya atau tidak.²⁹ Dalam membuat dan merumuskan kebijakan publik, Thomas mengutarakan 6 model untuk perumusan dan penyusunan kebijakan publik, yaitu.³⁰

1. Model Kelembagaan (*Institutional*)

Pada model kelembagaan, kebijakan publik dilihat sebagai aksi atau Tindakan yang dijalankan oleh pemerintah. Model kelembagaan acapkali diperuntukkan mengulas metode perumusan kebijakan, yaitu dipakai untuk mendeskripsikan kondisi lembaga pemerintah dan dipakai untuk mengkaji tentang hal-hal yang terkadang diatur oleh beberapa institusi maupun organisasi.

2. Model Kelompok

²⁸ Kimberly Martin et al., *Public Policy: Origins, Practice, and Analysis* (University of North Georgia PressDahlonge, Georgia, n.d.).

²⁹ Dye Thomas R, "Understanding Public Policy," 1992, <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300519645>.

³⁰ M.Si. Dr. Srs. Awan Y. Abdoellah and M.Si. Dr. Yudi Rusfiana, *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.Pdf* (ALFABETA, cv, 2016), <http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf>.

Pada model kelompok, kebijakan publik dianggap sebagai penyeimbang dalam mencapai perjuangan suatu kelompok, hubungan antar kelompok dan masyarakat juga dilihat sebagai pusat dari perhatian politik.

3. Model Elite

Pada model ini kebijakan publik diamati sebagai kehendak dan nilai-nilai yang di yakini sebagai elite yang berkuasa.

4. Model Rasional

Pada model rasional, kebijakan digunakan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif. Model ini dikenal juga dengan model sipnotik atau komprehensif.

5. Model Incremental

Pada model ini kebijakan publik dianggap sebagai kebijakan yang melanjutkan aksi-aksi pemerintah pada masa lampau yang kemudian memberikan perubahan sekadarnya.

6. Model System

Pada model ini kebijakan dianggap sebagai bentuk dari output dari suatu system, model system juga dikenal dengan “model Easton” atau “Eastonian model” hal ini dikarenakan model ini diciptakan oleh David Easton.

Adapun menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah suatu rangkaian aksi yang ditujukan, serta dilakukan dan diikuti oleh sekumpulan aktor ataupun seorang aktor dalam menangani suatu masalah tertentu. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai suatu rumusan yang disusun oleh seorang aktor. Aktor tersebut seperti presiden, ataupun lembaga-lembaga seperti eksekutif,

yudikatif, dan legislatif serta pihak yang berwenang lainnya.³¹ Dalam mendefinisikan Konsep ini, Anderson memiliki 5 implikasi yaitu:³²

1. Tiap-tiap kebijakan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu
2. Kebijakan adalah suatu rangkaian atau pola aksi yang dilaksanakan oleh aktor pemerintah
3. Kebijakan adalah suatu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kehendak pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
4. Kebijakan ini dapat bersifat positif maupun negative
5. Kebijakan publik yang bersifat positif akan berlandaskan pada hukum dikarenakan sifatnya yang otoritatif

Menurut James E. Anderson, ada 5 tahapan dalam membuat kebijakan publik yaitu:³³

1. Identifikasi Masalah (Problem formation), mengidentifikasi bagaimana suatu kebijakan dapat menjadi masalah publik dan bagaimana permasalahan ini ditindak lanjuti oleh pemerintah.
2. Perumusan Kebijakan (Formulation), merumuskan kebijakan alternatif sebagai bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, yang dimana perumusan kebijakan ini dilakukan oleh aktor pemerintah.
3. Pengabdopsian (Adoption), meliputi proses pembuatan kebijakan dan isi kebijakan, serta pengesahan kebijakan oleh aktor pemerintah

³¹ James E Anderson, *Public Policy-Making*, Second Edi (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1979), <https://archive.org/details/publicpolicymaki00ande/page/n5/mode/1up>.

³² *Ibid*

³³ *Ibid* (Hal 23-24)

4. Implementasi (Implementation), cara aktor pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya kepada pihak-pihak yang akan terlibat, contohnya (masyarakat)
5. Evaluasi (Evaluation), aktor pemerintah akan mengevaluasi efektivitas atau dampak dari kebijakan tersebut, dengan tujuan untuk melakukan perubahan atau pencabutan kebijakan.

Dalam kerangka kerja ini, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dianggap sebagai proses yang melibatkan unsur politis, karena terlibat dalam konflik dan persaingan antara individu dan kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dalam isu-isu kebijakan publik.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aksi yang diciptakan dan dilakukan oleh pemerintah, yang kemudian memberikan efek terhadap seluruh lapisan masyarakat. Studi kebijakan publik memiliki lingkup dari berbagai bidang seperti, sosial, ekonomi, hukum, budaya, politik dan sebagainya.³⁴ Kebijakan publik adalah wujud dari campur tangan pemerintah dalam memecahkan permasalahan publik dari beragam aspek kehidupan, kebijakan publik memberikan otoritas dan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa terkait suatu ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dari itu kebijakan publik ini memiliki sudut pandang yang pro kontra dikalangan masyarakat. Seperti kebijakan-kebijakan yang mengatur kepemilikan anak di China.

³⁴ MPA Prof. Dr. Muh. Irfan Islamy, "Definisi Dan Makna Kebijakan Publik," *ADPU4410/Modul 1*, 2014, 1–41.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kebijakan publik menurut James E. Anderson. Dimana pada saat berlakunya kebijakan *One Child Policy* menimbulkan permasalahan bagi publik di China, yaitu terjadinya resesi seks. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan tersebut, pemerintahan China dibawah kepemimpinan Xi Jinping akhirnya membuat kebijakan alternatif yaitu kebijakan *Three Child Policy*. Selain itu, Alasan penulis memilih Konsep kebijakan publik dalam penelitian ini adalah karena kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diratifikasi oleh pemerintah China serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah China merupakan kebijakan publik bagi negaranya, yang dimana resesi seks itu sendiri lambat laun akan semakin berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di China. Selain itu, pemilihan konsep kebijakan publik dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah China dalam menghadapi resesi seks di negaranya melalui kebijakan publik.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan suatu fenomena atau peristiwa secara objektif dengan cara mendeskripsikannya ataupun melalui gambaran-gambaran. Dari penelitian deskriptif ini, penulis menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari orang ketiga ataupun instansi-instansi yang telah melakukan penelitian sebelumnya, yang

kemudian informasi dari data tersebut dikutip oleh penulis.³⁵ Penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif dikarenakan dalam bentuk penyajiannya, penulis menggambarkan dan mendiskripsikannya secara objektif.

1.7.2 Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik analisis yang menggunakan system wawancara dan observasi untuk menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa dan bagaimana. Data yang dianalisis dengan menggunakan tipe ini dapat berwujud teks atau cerita. Menurut Strauss dan Corbin,³⁶ dalam buku *Research Methods for Business*, artikel kualitatif adalah jenis artikel yang menghasilkan wawasan yang tidak tersedia melalui statistik atau alat kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Dalam kualitatif ada subjek survei yang biasa disebut sebagai narasumber. Dalam artikel kualitatif, penulis menggali lebih dalam data tentang subjek tertentu.³⁷ Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian kualitatif induktif, karena permasalahan yang diteliti bersifat dari khusus ke umum yang mengeksplor data-data yang sudah ada dan melakukan pembaharuan dengan konsep yang sudah ada pula. Penelitian ini bersifat kualitatif dikarenakan pada saat melakukan riset penelitian, penulis

³⁵ S.I.K., M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

³⁶ Corbin Juliet and Strauss Anselm, "Basics of Qualitative Research - Juliet Corbin, Anselm Strauss, Anselm L. Strauss - Google Boeken," 2015, <https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=Dc45DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Basics+of+qualitative+research&ots=M2HMZUrRuq&sig=P6fCRkmLLhfSLGgYc6bUkTJUdbM#v=onepage&q=Basics of qualitative research&f=false>.

³⁷ Wiley John & Sons, *Research Methods For Business_ A Skill Building Approach - Uma Sekaran, Roger Bougie - Google Books*, 2016, https://books.google.co.id/books/about/Research_Methods_For_Business.html?id=Ko6bCgAAQBAJ&redir_esc=y.

mengambil data dengan cara studi pustaka yang menganalisis data-data berupa teks yang sudah ada.

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.3.1 Batasan Waktu

Adapun batasan waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pada tahun 2021 saat diberlakukannya kebijakan *Three Child Policy*

1.7.3.2 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini yaitu sejak diberlakukannya kebijakan *Three Child Policy*.

1.7.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik atau alat pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan Teknik studi literatur (Pustaka) atau studi dokumen (*Library research*). Yang dimana penulis mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan website artikel, jurnal online selain itu juga melalui buku serta berita online serta sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian penulis.

1.8 Argumen Pokok

Setelah melihat dampak dari resesi seks yang timbul akibat kebijakan *One Child Policy* akhirnya, pemerintahan Xi Jinping mengambil langkah dengan membuat kebijakan baru yaitu, kebijakan *Three Child Policy* sebagai upaya untuk

mengatasi permasalahan resesi seks yang kini mulai mengganggu perekonomian China. Pada kebijakan ini, pemerintahan Xi Jinping telah mengizinkan rakyatnya untuk memiliki tiga anak, selain itu pemberian insentif keuangan bagi keluarga dengan banyak anak, tunjangan keluarga dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, menghapus biaya kompensasi sosial untuk pasangan yang melanggar peraturan keluarga berencana, memangkas biaya-biaya yang dapat membebankan keluarga dalam persalinan, pengasuhan, dan pendidikan anak, melindungi hak dan kepentingan sah keluarga berencana, perluasan layanan penitipan, serta memberlakukan tindakan-tindakan pendukung untuk meringankan beban para pasangan China yang ingin atau telah memiliki tiga anak.

Tindakan pendukung tersebut ialah Menghapus tindakan pembatasan biaya pemeliharaan sosial dan menghapus hukum-hukum yang tidak relevan, Potongan pajak untuk biaya penitipan anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, Meningkatkan fungsi perawatan anak-anak dan perawatan lansia, Membangun sejumlah lembaga penitipan anak, Meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak, Menjaga kesehatan ibu hamil dan anak melalui mempeluas kapasitas untuk perawatan ibu hamil dan bayi baru lahir yang sakit kritis, mengoptimalkan cuti pasca melahirkan, meliputi cuti hamil dan menyusui. Serta asuransi persalinan, memberikan hak perlindungan dan pelatihan ulang bagi perempuan yang karirnya terganggu atau terhenti karena melahirkan.

Dalam pemberlakuan kebijakan publik *Three Child Policy* ada 5 tahapan yang dimulai dari identifikasi permasalahan yang ditemukan oleh pemerintahan Xi Jinping yaitu terjadinya resesi seks di China akibat kebijakan *One Child Policy*.

Setelah menemukan permasalahannya, pemerintahan Xi Jinping kemudian merumuskan dan mengadopsi kebijakan alternatif *Three Child Policy* sebagai solusi dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintahan Xi Jinping melalui perundang-undangan kependudukan dan keluarga berencana nasional China



1.9 Sistematika Penulisan

<p>BAB I</p> <p>PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang Masalah</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan Penelitian</p> <p>1.4 Manfaat Penelitian</p> <p> a. Manfaat Akademis</p> <p> b. Manfaat Praktis</p> <p>1.5 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.6 Konsep</p> <p>1.7 Metode Penelitian</p> <p> 1.7.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.7.2 Metode Analisis</p> <p> 1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> 1.7.3.1 Batasan Waktu</p> <p> 1.7.3.2 Batasan Materi</p> <p> 1.7.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.8 Argument Pokok</p> <p>1.9 Sistematika Penulisan</p> <p>1.10 Catatan Kaki (<i>Footnote</i>) dan Daftar Pustaka</p>
<p>BAB II</p>	<p>2.1 Penyebab Terjadinya Resesi Seks di China</p>

<p>DAMPAK TERJADINYA RESESI SEKS DI CHINA</p>	<p>2.2 Dampak Resesi Seks China Terhadap Populasi di China</p> <p>2.3 Dampak Resesi Seks China Terhadap Perekonomian di China</p>
<p>BAB III</p> <p>UPAYA PEMERINTAHAN XI JINPING DALAM MENGHADAPI RESESI SEKS DI CHINA MELALUI KEBIJAKAN <i>THREE CHILD POLICY</i></p>	<p>3.1 Pemberlakuan Kebijakan <i>Three Child Policy</i> Dalam Menghadapi Resesi Seks Di China</p> <p>3.1.1 Identifikasi Masalah Oleh Pemerintahan Xi Jinping</p> <p>3.1.2 Perumusan Kebijakan Alternatif Oleh Pemerintahan Xi Jinping</p> <p>3.1.3 Pengesahan Kebijakan <i>Three Child Policy</i> Sebagai Upaya Menghadapi Resesi Seks Di China Oleh Pemerintahan Xi Jinping</p> <p>3.1.4 Implementasi Kebijakan <i>Three Child Policy</i> Oleh Pemerintahan Xi Jinping</p>

	<p>3.1.5 Evaluasi Kebijakan <i>Three Child Policy</i> Oleh Pemerintahan Xi Jinping</p> <p>3.2 Tindakan Pendukung Pemerintahan Xi Jinping Dalam Menghadapi Resesi Seks Di Kalangan Masyarakat China</p>
<p>BAB IV</p> <p>PENUTUP</p>	<p>4.1 Pada Bab Ini Akan Berisi Kesimpulan</p>

